

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pendukung di bidang perencanaan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja Pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, melalui LKjIP tersajikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksana dan mendukung perwujudan masyarakat yang sejahtera.

LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Dengan demikian LKjIP merupakan salah satu sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2016 di susun sesuai dengan amanat dalam dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin di dalam indikator - indikator kinerja yang telah ditetapkan.

LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 semoga dapat memberikan gambaran yang transparan, obyektif dan terukur mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2016, sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di tahun – tahun yang akan datang

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2016. Semoga laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta dapat sebagai cermin pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2016.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, Maret 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL

Pembina Utama Muda

NIP. 19601212 198903 1 018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.....	1-1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1-3
1.3. Isu Strategis Organisasi	1-23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	2-1
2.2. Perjanjian Kinerja	2-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016	3-1
3.2. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran Tahun 2016.....	3-16
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	4-1
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	4-3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	1-14
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan	1-14
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan / Pangkat	1-17
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	1-17
Tabel 1.5	Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal	1-19
Tabel 1.6	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang.....	1-24
Tabel 1.7	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	1-27
Tabel 2.1	Keterkaitan Antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan dan Program/Kegiatan	2-7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016	2-12
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016	2-13
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016	2-15
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016	3-3
Tabel 3.2	Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang	3-4

Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015	3-6
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016.....	3-8
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016	3-17
Tabel 3.6	SILPA Tahun Anggaran 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	3-20
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2016 terhadap Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015	3-21
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016.....	3-23
Tabel 3.9	Total Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016	3-28
Tabel 3.10	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016	3-29
Tabel 3.11	Laporan Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016.....	3-30

DOKUMEN KOTA MAGELANG



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.....	1-6
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	1-14
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan	1-16
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	1-18
Gambar 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2015	3-6
Gambar 3.2	Workshop Perencanaan bagi personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk meningkatkan kapasitas karyawan.....	3-10
Gambar 3.3	Sistem Perencanaan Daerah kota Magelang (SIPPD)	3-11
Gambar 3.4	Pelaksanaan Musrenbang Kota Magelang Tahun 2016	3-12
Gambar 3.5	Pelaksanaan Konsultasi Publik yang melibatkan OPD, masyarakat, organisasi profesi dan Organisasi Masyarakat.....	3-13
Gambar 3.6	Pelaksanaan konsultasi Publik yang melibatkan Lansia dan Anak Sekolah	3-14
Gambar 3.7	Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam Penyusunan RKPD Pemerintah Kota Magelang yang melibatkan OPD, Masyarakat, Elemen Masyarakat, Organisasi masyarakat dan Organisasi Profesi	3-14
Gambar 3.8	FGD Penyusunan Dokumen Penyusunan Masterplan Smart City ..	3-15
Gambar 3.9	Implementasi dari Penyusunan Dokumen Urban Farming	3-16

Gambar 3.10	Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	3-18
Gambar 3.11	Realisasi Serapan Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.....	3-19
Gambar 3.12	Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	3-20
Gambar 3.13	Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja	3-28

DOKUMEN KOTA MAGELANG



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu lembaga teknik daerah yang melaksanakan urusan pendukung perencanaan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berupaya untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan pembangunan di daerah dan ketercapaian Visi Misi Kepala Daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sangat di pengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders sehingga di harapkan ke depan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan khususnya di bidang perencanaan daerah yang nanti dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat di lihat dari ketercapaian dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 mengacu pada keberhasilan pencapaian indikator sasaran dari Misi Pertama RPJMD “Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan professional dengan mengoptimalkan kemajuan tehnologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mapu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi pertama yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2016 di ukur dari 2 kinerja sasaran strategis di dalam misi pertama RPJMD yaitu sasaran terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel dan sasaran Meningkatkan kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun kedua sasaran tersebut mempunyai

empat indikator kinerja a). Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c). Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dan d). Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

Capaian untuk sasaran pertama dapat di lihat dari indikator kinerja sasaran yaitu Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2016 realisasi kinerja indikator sasaran ini mencapai 89% dari target 88 % yang ditetapkan pada tahun 2016 sehingga capaiannya sebesar 101.14%. Secara data pada tahun 2016 dari 70 indikator sasaran yang diamanatkan pada tahun 2016 sebanyak 62 sasaran telah mencapai target. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, realisasinya sebesar 100%. Implikasi dari indikator ini melibatkan Profil Daerah (di Bappeda) dan Data Go (Dinskominsta). Untuk Profil daerah (SIPD).

Capaian untuk sasaran ke dua dapat di lihat dari Indikator Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dengan realisasi pada tahun 2016 mencapai 56% atau tingkat capaiannya sebesar 101,82% dari target 55 % yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin akomodatifnya pemerintah Kota Magelang atas usulan program kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran ke dua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,77% dari target 2016 sebesar 51,72%. Capaian dari indikator ini sebesar 106.67%. Mitra OPD berupa forum warga ataupun forum-forum terkait akan memberikan dukungan yang positif dimulai ketika penyusunan perencanaan program kegiatan itu sendiri.

Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya di dukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Pada Tahun anggaran 2016 ini pencapaian indikator kinerja daerah di dilaksanakan oleh 14 program dan 77 kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap empat indikator kinerja yang di laksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016, rata – rata capaian indikator sasaran strategis yang di capai yaitu sebesar 125.2%

Dari evaluasi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan yang di laksanakan Bappeda pada tahun 2016 capaian output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2016 hampir seluruhnya sebesar 100%, hanya terdapat satu kegiatan dengan capaian realisasi fisik sebesar 75% sehingga capaian realisasi fisik kegiatan tahun 2016 yaitu sebesar 99.68% . Kegiatan yang capaian/ realisasi fisiknya tidak mencapai 100% pada tahun 2016 adalah kegiatan Kerja sama pengelolaan sampah antar daerah. Adapun alasan tidak tercapainya realisasi fisik sebesar 100% adalah karena tidak tercapainya output kegiatan yang menghasilkan 1 MOU pengelolaan sampah regional antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang. Sampai dengan akhir tahun, kegiatan ini masih berupa draft akhir MoU, namun belum di tanda tangani oleh pihak terkait (Dirjen PLP, Gubernur Jateng, Bupati Magelang dan Walikota Magelang)

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.900.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.128.573.069,- atau sebesar 91.32%. Realisasi tahun 2016 sedikit lebih di bandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar 86.62%. Realisasi capaian pada tahun 2016 terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar 92.25% dan realisasi belanja langsung 90.99% (realisasi belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 84.95%).

DOKUMEN KOTA MAGELANG



BAB. I PENDAHULUAN

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Isu Strategis Organisasi

1.1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun hal yang terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut maka setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan SAKIP. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan berikutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas, maka mulai tahun 2014 penyusunan laporan akuntabilitas SKPD mengalami perubahan nama/sebutan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disamping juga terjadi beberapa perubahan substansi apabila dibandingkan dengan laporan akuntabilitas pada tahun – tahun sebelumnya.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan iktisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Isu Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

1.2 Gambaran Umum Organisasi

A. Dasar Hukum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Magelang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan daerah

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan rencana program / kegiatan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang meliputi peneglolaan keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Bappeda dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan
- (3) Kepala Sub Bagian Program

c. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bappeda Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (2) Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha

d. Bidang Sosial Budaya.

Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pemuda,

olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan

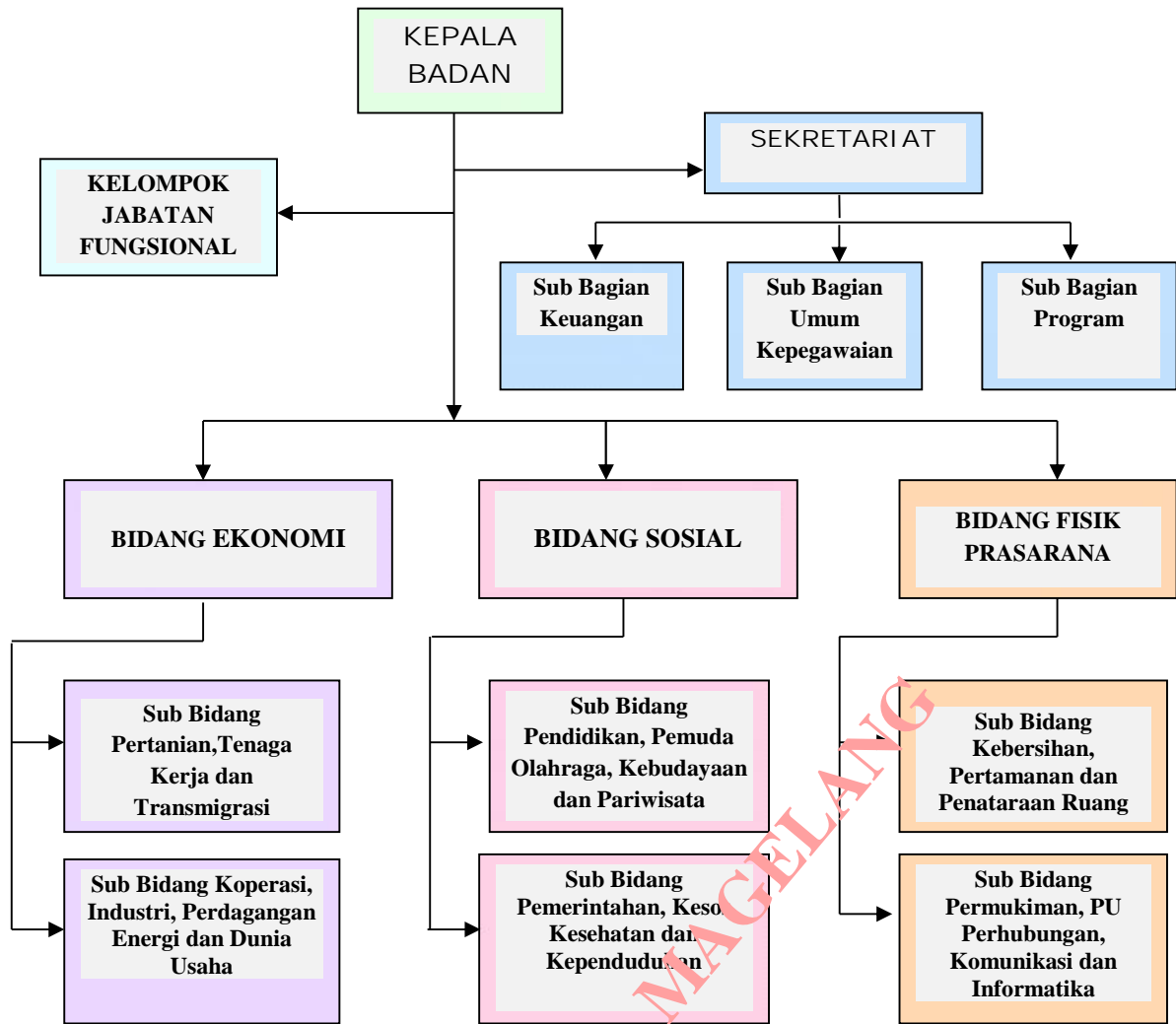
e. Bidang Fisik Prasarana.

Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bappeda Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Fisik Prasarana dibantu :

- (1) Kepala Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Penataan Ruang
- (2) Kepala Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

DOKUMEN KOTA MAGELANG



Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
- Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi perencanaan bidang fisik dan tata ruang, perencanaan bidang ekonomi, perencanaan bidang sosial budaya,;
- d. Pengkoordinasian kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;
- f. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap komponen aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Magelang antara lain :

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan.
 - c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
 - d. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.
2. Nama Jabatan : Sekretaris
Tugas Pokok dan Fungsi : Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program,

pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan badan.
 - b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian badan.
 - d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.
 - e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.
3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program
Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan badan.
 - c. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja badan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.
4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan badan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan badan.
- d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

5. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi
Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, koperasi, transmigrasi, industri, perdagangan, energi dan dunia usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang ekonomi.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi.
 - d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi.
7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

8. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi Dan Dunia Usaha

Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang koperasi, industri, perdagangan, energi dan dunia usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.

9. Nama Jabatan : Kepala Bidang Sosial Budaya

Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya,
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidag sosial budaya
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial Budaya.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya.

10. Nama Jabatan : Kepala Subid Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata.

Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Dan Kependudukan.

Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.

12. Nama Jabatan : Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana
- Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kebersihan, pertamanan, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.
- b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.
- c. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang
- Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kebersihan, pertamanan dan penataan ruang

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.

- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.
- c. Pelaksanaan kegiatan Subid Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.

14. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

3. Sumber Daya

a. Susunan Kepegawaian

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Desember 2016 berjumlah 38 orang dengan komposisi sebagai berikut :

❖ Menurut Jenis Kelamin :

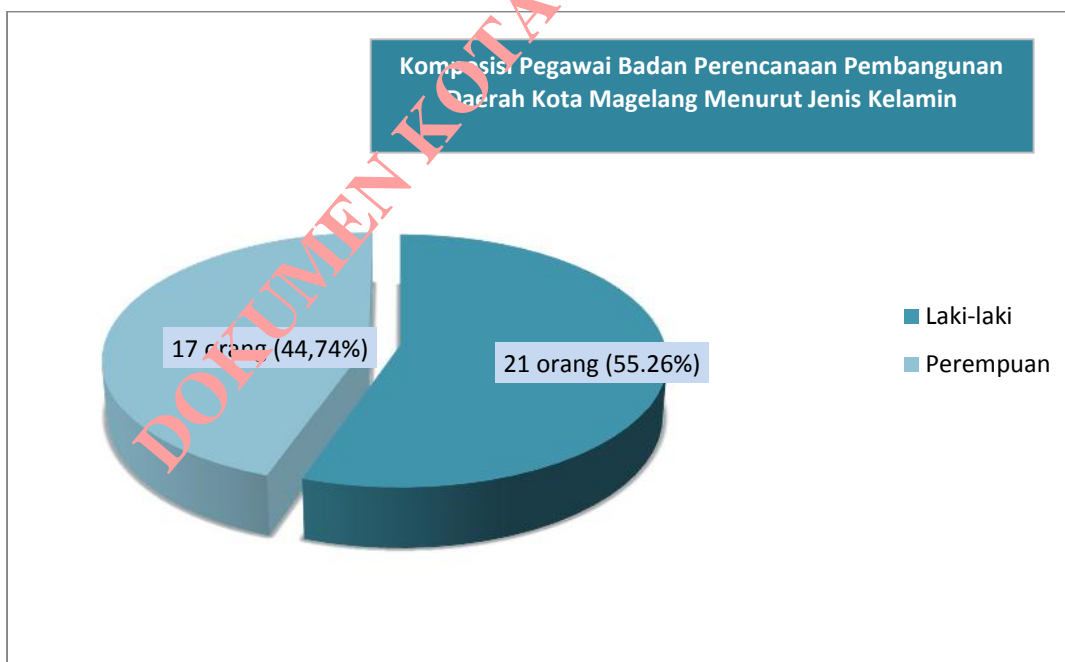
Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 55,26% dari total pegawai perempuan yaitu sebesar 44,74% sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	21	55,26%
2	Perempuan	17	44,74%
		38	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2016, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin untuk kondisi saat ini dan lima tahun ke depan telah mencukupi kebutuhan. Jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dari jumlah pegawai laki-laki, namun selisihnya tidak signifikan hanya terpaut sekitar 10.52% hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di Bappeda Kota Magelang telah memperhatikan adanya perspektif gender. Apabila melihat dari segi jumlah maupun komposisi pada saat ini, kebutuhan karyawan Bappeda telah tercukupi sesuai bidang tugasnya baik pekerjaan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis walaupun sebenarnya jumlah ini belum memenuhi kebutuhan minimal yang sesuai dengan beban kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

❖ Menurut Jabatan :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II,III dan IV sebesar 39.47% sedangkan prosentase untuk jumlah pelaksana/staf yang sebesar 60.53% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2 berikut:

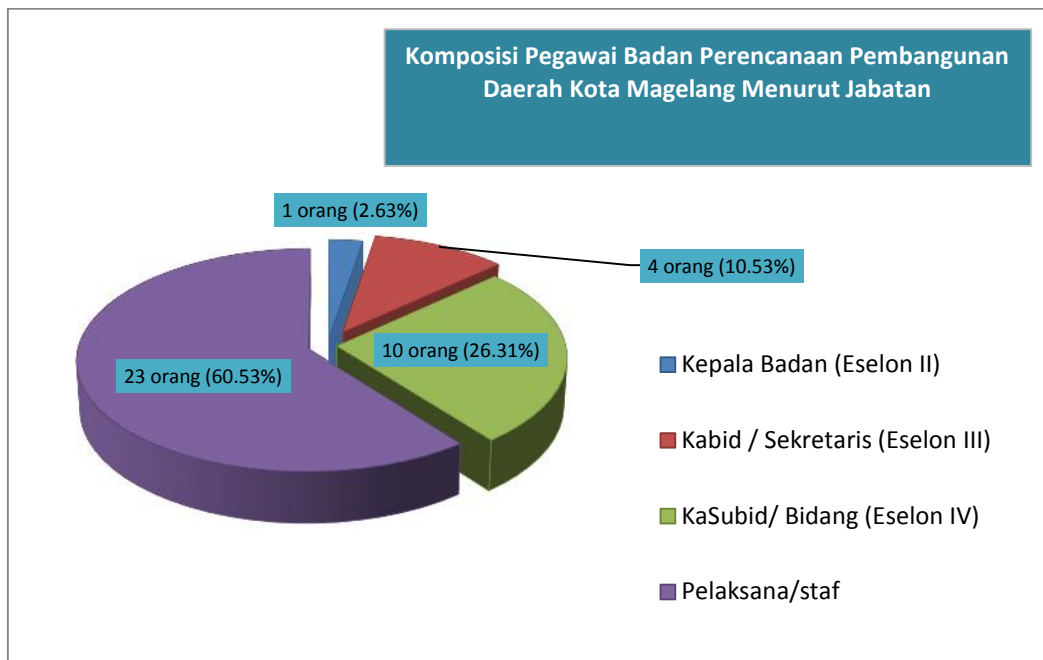
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	2.63 %
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	4	10.53 %
3	Kepala Sub Bagian/ Bidang (Eselon IV)	10	26.31 %
4	Pelaksana/staf	23	60.53 %
		38	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2016, data diolah

Berdasarkan tabel di atas Dari jumlah pejabat struktural pada akhir tahun 2016 terdapat seluruh jabatan telah terisi walaupun sampai dengan akhir tahun 2016 masih terdapat satu jabatan yang kosong di karenakan sedang mengikuti tugas belajar, sementara dari jumlah 23 orang pelaksana/staf tersebut pada saat ini terdapat 5 karyawan yang sedang mengikuti tugas belajar sampai dengan satu atau dua tahun ke depan. Lebih terperinci dari data di atas bahwa pegawai dengan Golongan I dan Golongan II sebanyak 6 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf sedangkan untuk karyawan Golongan III terdiri dari 2 orang berkedudukan sebagai Kepala Bidang, 10 orang berkedudukan sebagai Pejabat Eselon IV (Kasubid) dan 17 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf.

Gambar di bawah ini memperlihatkan komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Jabatan sebagai berikut:



Gambar 1.3

Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

Jumlah pelaksana/staf yang menurun mengakibatkan jumlah pegawai belum bisa dikatakan mencapai jumlah ideal yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja yang harus di pikul oleh Bappeda, mengingat pelaksana/staf merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Hal yang perlu di antisipasi sejak dini adalah kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan sebagai pelaksana/staf maupun yang berkedudukan dalam jabatan struktural/ fungsional dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini karena dalam waktu 5 tahun ke depan terdapat 3 orang karyawan Bappeda yang memasuki masa pensiun. Selain karyawan yang memasuki masa pensiun, maka hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya regulasi terkait dengan ASN atau Aparat Sipil Negara di mana setiap karyawan akan terspesifikasi berdasarkan dengan keahlian dan kompetensi. Undang – Undang ASN tersebut menuntut setiap karyawan untuk bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugas dan keahlian atau kompetensi yang di miliki. Hal tersebut merupakan tantangan di dalam pengelolaan sumber daya manusia yang di miliki oleh organisasi.

Untuk jabatan Fungsional pada saat ini di Bappeda belum ada dikarenakan pegawai yang seharusnya menduduki posisi sebagai Pejabat Fungsional tertentu menunggu penetapan jabatan fungsionalnya yang masih harus melalui beberapa

proses. Pada Bappeda Kota Magelang kebutuhan secara ideal untuk suatu Badan Perencanaan membutuhkan lebih dari satu orang tenaga Fungsional Perencana karena terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah

❖ Menurut Golongan/ Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/ golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 75.68% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	1	2.70 %
2	Golongan II	5	13.51 %
3	Golongan III	28	75.68 %
4	Golongan IV	3	8.11%
		37	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2016, data diolah

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 89.51% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.4:

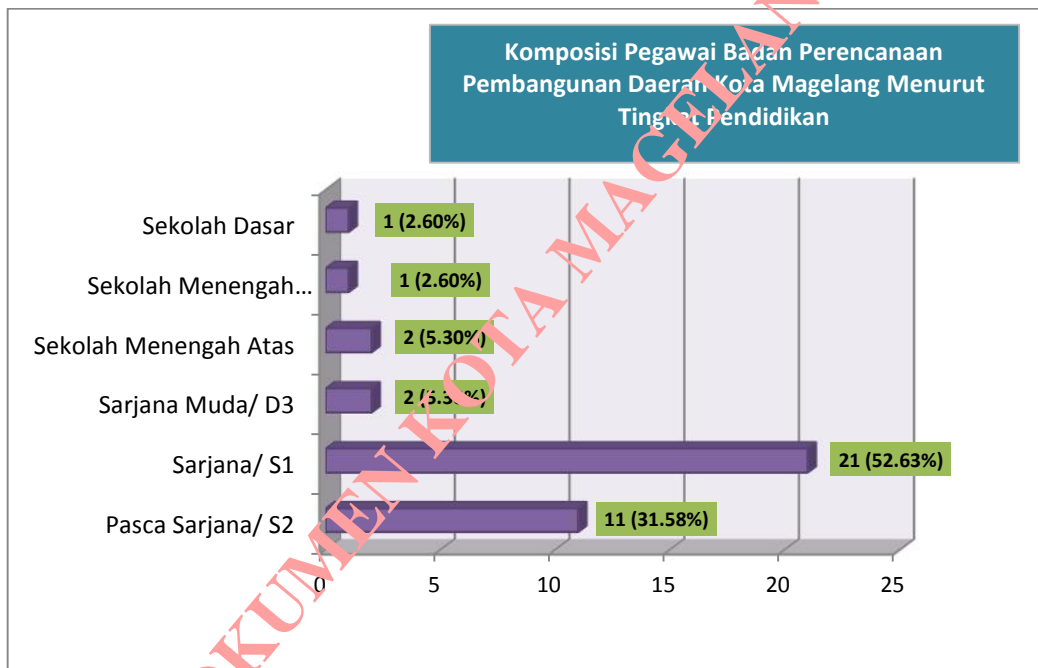
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	6	15.79	5	13.15	11	28.95 %
2	Sarjana/ S1	10	23,53	11	28.95	21	55.26 %
3	Sarjana Muda/ D3	1	2,63	1	2,63	2	5.26 %
4	Sekolah Menengah Atas	2	5,26	0	0	2	5.26 %
5	Sekolah Menengah Pertama	1	2.63	-	0	1	2.63%

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
6	Sekolah Dasar	1	2,63	-	0	1	2.63%
		21		17		38	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2016, data diolah

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.5 di atas, tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan sarjana/S1 yaitu sebanyak 52.63% yang terdiri dari 10 karyawan laki-laki dan 10 karyawan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada kesetaraan gender dalam komposisi pegawai pada Bappeda Kota Magelang. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Bappeda Kota Magelang yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi ,misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran organisasi.



Gambar 1.4

Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan Pasca Sarjana/S2 cukup besar, yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 31.58 % dari total seluruh pegawai Bappeda. Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bappeda memberikan peluang kepada pegawai yang ingin

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Saat ini ada 5 (lima) pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dengan mendapat fasilitas beasiswa yang sebagian besar berasal dari Bappenas.

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan pendidikan formalnya.

Tabel 1.5 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang)
Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
<u>Kepala Bappeda</u> S2 Urban Planing	1 org	1 org	
<u>Sekretariat Bappeda</u>			
a. S2 Tehnik Perencanaan Wilayah	1 org	2 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	3 org	3 org	
c. S2 Akuntansi	1 org	1 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	2 org	4 org	
e. S1 Tehnik Perenc. Wil Kota	1 org	1 org	
f. S1 Tehnik Sipil	1 org	1 org	
g. S1 Hukum	1 org	1 org	
h. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
i. S1 Tehnik Informatika	1 org	2 org	
j. S1 Design Interior	1 org	1 org	
k. SLTA sederajat	1 org	3 org	
l. Sekolah Dasar	1 org	1 org	
<u>Bidang Dispora</u>			
a. S2 Tehnik Perencanaan Wilayah	1 org	3 org	
b. S1 Arsitek	1 org	1 org	
c. S1 Tehnik Perencanaan Wilayah	2 org	2 org	

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
d. S1 Tehnik Sipil	1 org	1 org	
e. S1 sospol	1org	1 org	
f. SLTA Sederajad	1 org	1 org	
<u>Bidang Ekonomi</u>			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org	2 org	
b. S2 Manajemen	1 org	1 org	
c. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	2 org	
d. D3 Tehnik Informatika	1 org	1 org	
e. SLTA Sederajad	1 org	1 org	
f. S1 Ekonomi Pembangunan		1 org	
g. S1 Pertanian		1 org	
<u>Bidang Sosial Budaya Bappeda</u>			
a. S2 Kebijakan Publik	1 org	1 org	
b. S2 Tehnik Perenc. Wil Kota	2 org	2 org	
c. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
d. S1 Tehnik Mesin	1 org	1 org	
e. SLPT sederajad	1 org	1 org	
f. S1/S2 Kebijakan Publik		2 org	

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2016, data diolah

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappeda sebagai berikut :

1. Gedung bertingkat lantai dua 1 unit yang terdiri dari ruang aula 1 buah, Ruang sidang 3 buah 1 ruang serba guna di balkon lantai 2, ruang kepala 1 buah, ruang sekretaris 1 buah, ruang sekretariat 1 buah, ruang Kepala Bidang dan staf 3 buah, ruang Kasubag Keuangan 1 buah, ruang sekretariat FEDEP 1 buah, ruang dapur dan pantry 1 buah, gudang dan tempat arsip 3 buah, ruang mushola 1 buah, 1 ruang laktasi, 2 garasi kendaraan 5 kamar mandi umum dan 2 kamar mandi di dalam ruangan Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda
2. Kendaraan bermotor roda dua sebanyak 20 unit
3. Kendaraan bermotor roda empat sebanyak 5 unit
4. Almari (rak besar) 4 unit
5. Filling kabiner 4 buah
6. Rak arsip/rak buku dan almari perpustakaan 9 buah
7. Rak Server 1 buah
8. Almari besi/Almari sliding kaca/Almari rak kaca 17 buah
9. Brankas 1 buah
10. Rak kayu multiplek 1 buah
11. Rak arsip gudang 11 buah
12. Rak arsip besi 1 buah
13. Etalase 2 buah
14. Rak kayu tempat gambar 1 buah
15. LCD 4 buah
16. LCD Proyektor 1 buah
17. Mesin penghancur dokumen 1 buah
18. Mesin absensi 1 buah
19. White board elektronik 1 buah
20. Software E-Office
21. Meja panjang 10 unit
22. Meja pingpong 1 unit
23. Meja kursi tamu 11 unit
24. Meja roda perpustakaan 4 unit
25. Kursi kerja 5 unit
26. Meja rapat/meja kerja 13 unit
27. Server wireless 1 unit
28. Peralatan jaringan computer 1 paket
29. Komputer server 1 unit

30. Meja ½ giro/ meja kerja 38 unit
31. Kursi lipat 219 unit
32. Kursi rapat 30 1unit
33. Kursi kerja 46 (kursi putar, kursi computer, kayu putar dan

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama asset–asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset – asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Terkait dengan asset – asset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset – asset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi asset sesuai dengan kebijakan akuntansi. Penghapusan asset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan asset–asset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

Dalam catatan Pengurus barang terdapat data asset yang di rencanakan akan di hapuskan dalam beberapa tahun ke depan. Secara pencatatan akuntansi masuk ke dalam asset lain – lain. Asset ini apabila di lihat dari nilai kemanfaatannya /nilai bukunya sudah habis (nol) di karenakan adanya penyusutan dari asset tersebut (masa manfaatnya sama dengan dengan manfaat berjalannya sehingga sisa manfaatnya nol).

Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, sehingga asset–asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi asset. Manajemen pengelolaan asset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP sehingga setiap SKPD mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP melalui manajemen asset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.3 Isu Strategis Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di dalam Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dengan gambaran fungsi secara garis besar sebagai penyusun kebijakan teknis, memberikan dukungan teknis perencanaan kepada semua perangkat daerah, pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan teknis perencanaan.

Salah satu tantangan ke depan dari suatu organisasi Perencanaan adalah bagaimana sumber daya organisasi tersebut dapat di manfaat dengan optimal sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan daerah yang berkualitas. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas didukung kompetensi dan keahlian di bidang perencanaan serta ketersediaan sarana dan prasarana serta suasana kerja yang lebih egaliter dan kondusif, diharapkan akan mengembangkan kreativitas dan inovasi dari aparatur perencana di Bappeda. Hal ini menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk rencana yang berkualitas

Dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani.

Dari uraian diatas, maka akan membawa pada kesiapan badan perencanaan dalam menghasilkan produk-produk rencana yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (bottom-up), dari atas (top-down), teknokratik, politik dan inovasi.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan Jurusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan adalah di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Sebagai contoh untuk Pokok pokok pikiran DPRD sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, diamanatkan untuk disampaikan kepada Eksekutif dalam hal ini Bappeda sejak Rancangan Awal RKPD Tahun rencana (Januari), namun demikian selama ini hal

tersebut belum bisa terwujud. Sehingga capaian indikator Tingkat Ketersediaan Pokok Pikiran Dewan tepat waktu baru dapat tercapai 50%;

- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi;
- c. Masih dijumpai kesulitan dan miskoordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga konsep solusi permasalahan tidak tersolusikan secara komprehensif.
- d. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program
- e. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
- f. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global .

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda kota Magelang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan SKPD	Terdapat beberapa aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah	Masih adanya koordinasi, perencananaan dan monev bidang yang perlu	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Terpilih	disusun, diimplementasikan dan dan monitoring implmentasinya secara intensif	prasarana yang memadai		<ul style="list-style-type: none"> 1. dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi 2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus
Kajian terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	<ul style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang 4. Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan
Kajian terhadap Renstra Bappenas 2014-2019	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	<ul style="list-style-type: none"> 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	<ul style="list-style-type: none"> 6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
Kajian terhadap KLHS		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai		<ul style="list-style-type: none"> 7. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang 8. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang 9. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
				<p>10. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;</p> <p>11. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;</p> <p>12. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP)</p> <p>13. Tidak seimbang beban kerja dengan kapasitas SDM</p> <p>14. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan</p>

DOKUMEN KOTA MAGELANG

Selanjutnya, dianalisis isu - isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi secara relevan dari faktor-faktor eksternal lainnya yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Tuntutan pemenuhan akan ratifikasi Sustainable Development Goals (SDGs)	Belum adanya regulasi operasional terkait UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi pembangunan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
2	Masuknya Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN	Perubahan paradigma pembangunan dari money follow function menjadi money follow program prioritas	Belum tuntasnya isu perluasan wilayah Kota Magelang yang melibatkan daerah sekitar	Belum optimalnya implemtasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Magelang
3	Kecenderungan melemahnya ekonomi global	Implikasi UU 23 Tahun 2014 terkait dengan mekanisme hibah dan bansos	Masih adanya ego kewilayahan antar kabupaten Kota sehingga aspek kerjasama antar daerah menjadi kurang optimal	Belum optimalnya partisipasi pilar keempat : media massa
4		Semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar rumah tangga dan antar wilayah	Adanya rencana reaktivasi rel kereta api yang menembus Kota Magelang mempengaruhi konstelasi secara geoekonomi dan sosial	Masih lemahnya skenario optimalisasi Corporate Sosial responsibility untuk partisipasinya dalam pembangunan Kota
		Implementasi dari Nawa Cita yang masih dalam rangka mencari bentuk terbaiknya	Munculnya Kabupaten Kota yang menjadi bintang inovasi memberikan tantangan bagi Kota	Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

DOKUMEN KOTA MAGELANG



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2016- 2021

2.2 Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut: "MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS".

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kota Jasa yang Modern dan Cerdas

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik:

- a) Masyarakat sejahtera dalam financial;
- b) Kota terdepan dalam pelayanan, yaitu kota modern harus bisa menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum;
- c) Visual kota mengundang pesona, dalam arti bahwa kota modern harus dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

Unsur-unsur Kota Cerdas meliputi:

- a) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- b) Smart infrastructure yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;
- c) Smart Economy, yaitu : pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif;
- d) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- e) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta
- f) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

Dalam mewujudkan kota cerdas, keenam komponen tersebut diatas, yang juga bisa dikemas dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu smart economy, smart social dan smart environment, juga diperhatikan 3 komponen yang menjadikan mampu membangun kota cerdas (enabler), yaitu sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola.

2. Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pementapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui:

- a) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- b) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- c) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

3. Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan hasil telaahan telaah Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021, dan dilandasi komitmen Bappeda Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan terkait bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari rumusan strategi dan kebijakan.

a. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
7. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

b. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran untuk mewujudkan tujuan pertama, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatkan kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
2. Sasaran untuk mewujudkan tujuan kedua Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
3. Sasaran untuk mewujudkan tujuan ketiga, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .
4. Untuk mewujudkan tujuan keempat, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
 - b) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
 - c) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
5. Untuk mewujudkan tujuan ke lima, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan

6. Untuk mewujudkan tujuan ke enam, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
 - b) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
 - c) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas
7. Untuk mewujudkan tujuan ke tujuh, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
 - b) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - c) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
8. Untuk mewujudkan tujuan ke delapan, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
 - b) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - c) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

c. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk

mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan (ii) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan OPD dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

DOKUMEN KOTA MAGELANG

TABEL 2.1 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	1. Memfasilitasi aparatur perencanaan untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencana dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan. 2. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan data base perencanaan berbasis teknologi informatika	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor serta kegiatan pemeliharaan aset kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Bappeda 2. Pengembangan fitur fitur SIPPD serta website Bappeda
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.	1. Penyediaan dan implementasi Standart Operating Procedure (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan 2. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf	1. Melaksanakan pengelolaan administrasi 2. Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset OPD 3. Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan OPD secara tertib, lancar ,tepat waktu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan</p> <p>3. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran</p>	
4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	<p>1. Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah</p> <p>3. Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan</p>	Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	b. Terwujudnya dukungan data dan informasi ter-update	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 	<p>Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan</p> <p>Publikasi proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui webiste bappeda</p>
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan 	Penyusunan dokumen tahunan yang konsisten dengan dokumen jangka menengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang ekonomi pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
7. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi FispraWil	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang ekonomi fisprawil dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan integral	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana Wilayah di Kota Magelang yang meliputi urusan di bawah koordinasi bidang ekonomi Prasarana Wilayah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang sesuai urusan di bawah kewenangan koordinasi bidang sosial budaya
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi Fisik Prasarana Wilayah Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Prasarana Wilayah Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

2.2 Perjanjian Kinerja

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2016 adalah Perjanjian Kinerja yang telah di sempurnakan dengan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2016. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016. Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
MISI I : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	Prosentase	88%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Prosentase	60%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	Prosentase	55%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	Prosentase	51.72%

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, indikator kinerja program yang mendukung sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2016

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
<p>MI SI I : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>					
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	<p>a. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S1 • S2 • S3 <p>b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran</p> <p>c. Cakupan seminar/ workshop /pelatihan yang diselenggarakan Bappeda</p>	%	53% 23% 0% 85%	Rp. 81.510.000,-
2	Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/ Jumlah data yang dibutuhkan	%	85%	Rp.120.488.000,-
3	Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	jumlah	1	Rp.575.786.000,-

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	Rp.2.097.416.000,-
		b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	%	65%	
		c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	%	70%	
		d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	%	30%	
		e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	74%	
5	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	%	100%	Rp. 298.174.000,-
6	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	%	100%	Rp. 563.742.000,-
7	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	%	100%	Rp. 507.148.000,-

❖ Rencana Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Di tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota melaksanakan 14 Program dan 77 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2016

No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
	1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596,610,000
1	1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	625,000
2	1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76,800,000
3	1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7,050,000
4	1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125,725,000
5	1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	59,246,000
6	1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15,058,000
7	1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34,844,000
8	1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000
9	1.06 . 1.06.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan pemadam tangga	3,571,000
10	1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,520,000
11	1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1,450,000
12	1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25,900,000
13	1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	179,530,000
14	1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	56,291,000
	1.06 . 1.06.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	771,906,000
15	1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19,430,000
16	1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	62,060,000

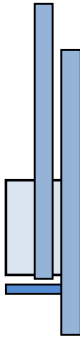
No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
17	1.06 . 1.06.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	217,425,000
18	1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178,060,000
19	1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	29,856,000
20	1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71,015,000
21	1.06 . 1.06.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000
22	1.06 . 1.06.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	191,060,000
	1.06 . 1.06.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	81,510,000
23	1.06 . 1.06.01 . 05 . 07	Workshop perencanaan pembangunan daerah	53,750,000
24	1.06 . 1.06.01 . 05 . 08	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	27,760,000
	1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54,149,000
25	1.06 . 1.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,482,000
26	1.06 . 1.06.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8,530,000
27	1.06 . 1.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,429,000
28	1.06 . 1.06.01 . 06 . 08	Penyusunan RKA-SKPD	18,973,000
29	1.06 . 1.06.01 . 06 . 09	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD	5,735,000
	1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	120,488,000
30	1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah	120,488,000
	1.08 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46,161,000
31	1.08 . 1.06.01 . 15 . 09	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah	46,161,000
	1.04 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	236,679,000
32	1.04 . 1.06.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	236,679,000
	1.05 . 1.06.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang	560,413,000
33	1.05 . 1.06.01 . 15 . 18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	285,917,000

No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
34	1.05 . 1.06.01 . 15 . 26	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	200,734,000
35	1.05 . 1.06.01 . 15 . 54	Review Raperda RTRW Kota Magelang	73,762,000
	1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	575,786,000
36	1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	575,786,000
	1.06 . 1.06.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	2,097,416,000
37	1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Penyusunan rancangan RPJMD	305,202,000
38	1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	69,580,000
39	1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPDP	293,328,000
40	1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	109,200,000
41	1.06 . 1.06.01 . 21 . 10	Penetapan RKPDP	34,855,000
42	1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	16,565,000
43	1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	Forum SKPD dan FGD	109,718,000
44	1.06 . 1.06.01 . 21 . 19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	33,665,000
45	1.06 . 1.06.01 . 21 . 32	Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD	71,384,000
46	1.06 . 1.06.01 . 21 . 36	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPDP	120,900,000
47	1.06 . 1.06.01 . 21 . 37	Penetapan Perubahan RKPDP	29,305,000
48	1.06 . 1.06.01 . 21 . 38	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	70,904,000
49	1.06 . 1.06.01 . 21 . 40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	81,059,000
50	1.06 . 1.06.01 . 21 . 62	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Gunung Tidar	183,978,000
51	1.06 . 1.06.01 . 21 . 42	Pengendalian dan Evaluasi RKPDP	39,445,000
52	1.06 . 1.06.01 . 21 . 44	Konsultasi Publik RPJMD	44,299,000
53	1.06 . 1.06.01 . 21 . 45	Forum SKPD dan FGD RPJMD	53,038,000
54	1.06 . 1.06.01 . 21 . 47	Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD	72,554,000
55	1.06 . 1.06.01 . 21 . 48	Penetapan indikator kinerja RPJMD	62,070,000
56	1.06 . 1.06.01 . 21 . 49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	129,940,000

No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
57	1.06.1.06.01.21.54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	13,695,000
58	1.06.1.06.01.21.55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10,242,000
59	1.06.1.06.01.21.60	Sosialisasi RPJMD Kota Magelang	69,845,000
60	1.06.1.06.01.21.61	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Air Minum Daerah (Jakstrada)	72,645,000
	1.06.1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	298,174,000
61	1.06.1.06.01.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	7,890,000
62	1.06.1.06.01.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12,160,000
63	1.06.1.06.01.22.34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	142,605,000
64	1.06.1.06.01.22.35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura	135,519,000
	1.06.1.06.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	563,742,000
65	1.06.1.06.01.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	13,043,000
66	1.06.1.06.01.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16,340,000
67	1.06.1.06.01.23.10	Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	100,467,000
68	1.06.1.06.01.23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PUS)	97,257,000
69	1.06.1.06.01.23.24	Perencanaan Pengembangan Olahraga	201,750,000
70	1.06.1.06.01.23.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	71,030,000
71	1.06.1.06.01.23.36	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	63,855,000
	1.08.1.06.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	20,000,000
72	1.08.1.06.01.24.06	Pemeliharaan RTH	20,000,000
	1.06.1.06.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	507,148,000
73	1.06.1.06.01.26.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	32,469,000

No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
74	1.06.1.06.01.26.02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	14,640,000
75	1.06.1.06.01.26.10	Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman	165,770,000
76	1.06.1.06.01.26.09	Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity	221,206,000
77	1.06.1.06.01.26.12	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah	73,063,000
TOTAL			6,530,182,000

DOKUMEN KOTA MAGELANG



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja 2016

2.2 Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran 2016

3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja maupun Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh OPD. Agar pencapaian sasaran – sasaran tersebut dapat lebih terukur maka dituangkan ke dalam indikator – indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran – sasaran tersebut dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam yaitu:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang
- Nilai > 55 s/d 80 : cukup
- Nilai >80 s/d 95 : baik
- Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik

Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 sebagaimana uraian berikut ini: Misi Pertama "Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan professional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mapu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat "

Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi pertama yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
- b. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan.

Kedua indikator tersebut dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu a). Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c). Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dan d). Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga. Berikut ditampilkan capaian indikator sasaran dan hasil pengukuran untuk keempat indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian
<p>MISI I : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>					
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	88%	89%	101.14%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	100%	166.67%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	55%	56%	101.82%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	51.72%	55.17%	106.67%

Analisis terhadap hasil capaian indikator sasaran tersebut di atas sebagai berikut:

Salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah dimulai dari aspek perencanaan. Secara teoritis, perencanaan yang baik telah memberikan kontribusi mendekati kisaran 50%. Dapat dikatakan bahwa apabila daerah gagal merencanakan dengan baik pembangunan daerahnya maka diibaratka sedang merencanakan kegagalan pembangunan itu sendiri.

Dalam pendekatan perencanaan pembangunan daerah, dikenal beberapa pendekatan proses perencanaan antara lain pendekatan partisipatif mendampingi beberapa pendekatan yang lain yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan top down/ bottom up serta pendekatan politis. Pendekatan partisipatif memiliki proporsi strategis mengingat bahwa peran partisipasi masyarakat sangat menentukan. Semakin kritis dan partisipatif masyarakat kota terlibat dalam perencanaan mengindikasikan semakin baik pembangunan. Hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan data yang akurat dan akuntabel agar pengambilan keputusan perencanaan dan kebijakan daerah tidak keliru.

Dilihat dari indikator kinerja sasaran Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2015 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah mencapai 85%, kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 89% dari target 88 % yang ditetapkan pada tahun 2016. Secara data pada tahun 2016 dari 70 indikator sasaran yang diamanatkan pada tahun 2016 sebanyak 62 sasaran telah mencapai target. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi. Sedangkan kebijakan umum yang di usung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah

Indikator Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan melibatkan Profil Daerah (di Bappeda) dan Data Go (Dinskominsta). Untuk Profil daerah (SIPD) telah tercapai 100 %. Pada tahun 2016 untuk data Profil Daerah sudah mempergunakan software Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Adapun capaian dari indikator publikasi data dan statistiik sektoral yang menjadi kewenangan dan di dukung pencapaiannya oleh Kantor Litbang Statistik

Indikator Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD, capaian tahun 2015 adalah 52% sedangkan pada tahun 2016 realisasinya mencapai 56% atau tingkat capaiannya sebesar 101,82% dari target 55 % yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin akomodatifnya pemerintah Kota Magelang atas usulan program kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sementara itu Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% dari target 2016 sebesar 51,72%. Capaian dari indikator ini sebesar 106.67%

Mitra OPD berupa forum warga ataupun forum-forum terkait akan memberikan dukungan yang positif dimulai ketika penyusunan perencanaan program kegiatan itu sendiri. Lebih dari separuh OPD telah memiliki mitra kerja, sedangkan sebagian lainnya optimis mampu tercapai pada tahun-tahun mendatang hingga tahun 2021.

Table 3.2 Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Magelang

NO	OPD	MITRA KERJA
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dewan Kesenian Kota
2	Dinas Kesehatan	Kader Posyandu
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

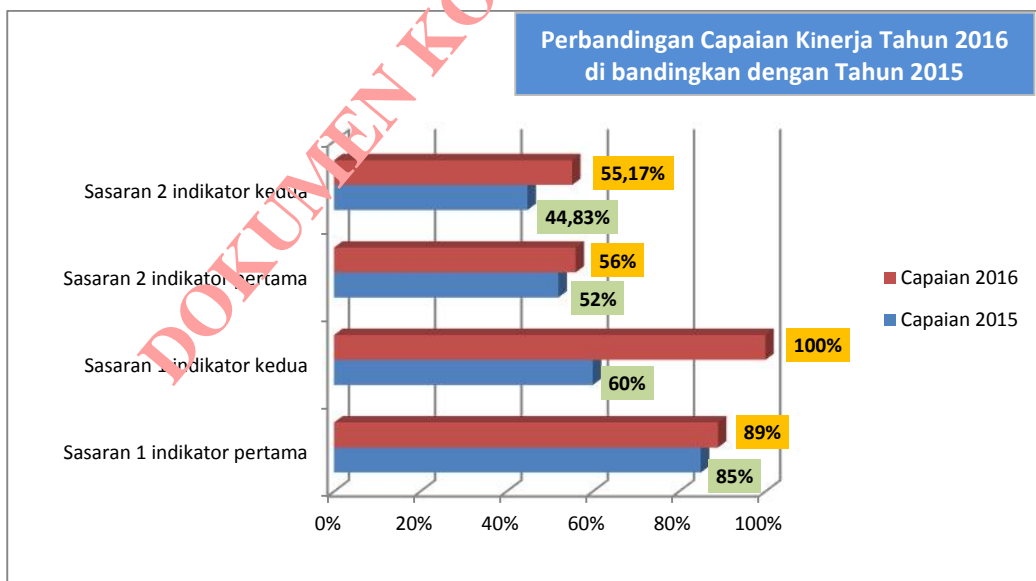
NO	OPD	MITRA KERJA
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Kader Trantip
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	FKUB, FPBI, FKDM
8	Dinas Sosial	Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, taruna Siaga Bencana, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
9	Dinas Tenaga Kerja	SPSI
10	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat penggerak kampung organik dan bank sampah
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Forum LPM, Forum LKM, Forum LKK, UP2KPKK, Obama, Forum Anak, Poktan
13	Dinas Perhubungan	Organda dan PO2
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	Kelompok Informasi Masyarakat
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	Dewan Kesenian Kota
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Masyarakat Pecinta Buku, Ulat Buku
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	Cat lover, Gapoktan
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Forum Mega Tidar
20	Sekretariat Daerah	
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
22	Kecamatan Magelang Selatan	
23	Kecamatan Magelang Tengah	
24	Kecamatan Magelang Utara	
25	Inspektorat	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Magelang Kota Toea, Undip, UNY, UNS , UGM, Untid dan Universitas Muhammadiyah Magelang
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Forum Jarlitbangrap iptek (Jarlitbang, Dewan Riset Daerah (DRD) dan Forum Alumni Karya Siswa

Tabel di bawah ini memberikan gambaran perbandingan antara Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 sebagai tahun pertama perencanaan pada Renstra OPD dengan tahun dasar perencanaan pada tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		
			2015	2016	%
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	89%	103.49%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	100%	166.67%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	56%	107.69%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44.83%	55.17%	123.06%

Berdasarkan capaian kinerja pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2016 melebihi target yang di targetkan pada tahun 2016 dan apabila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2015 di mana tahun 2015 merupakan tahun dasar bagi perencanaan maka dapat kita lihat bahwa capaian pada tahun 2016 jauh melebihi capaian kinerja pada tahun dasar 2015.



Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2015

Capaian sasaran tersebut dapat terrealisasi dengan keberhasilan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi yang melibatkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan media dan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dimana program yang dominan adalah Program perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan beberapa program.

Permasalahan dalam pencapaian indikator sasaran ini antara lain :

1. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
2. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global .
3. Masih minimnya jumlah MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kementerian/LNDP/pembina terkait penelitian & pengembangan
4. Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat
5. Rendahnya proporsi SDM pengelola kelitbang
6. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang
7. Belum terimplementasikannya online jurnal system di Kota Magelang
8. Belum adanya payung hukum yang mengatur Penguatan Sistem Inovasi Daerah
9. Belum optimalnya fungsi Forum Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Jarlitbangrap IPTEK)
10. Belum optimalnya pemberdayaan forum warga dan mitra OPD

Soulsi atas permasalahan yang dihadapi

1. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu isu strategis pembangunan
2. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel
3. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang

berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada.

4. Peningkatan akses terhadap aspirasi masyarakat lewat berbagai media
5. Pemberdayaan Forum Mitra OPD melalui berbagai skenario program kegiatan
6. Optimalisasi fungsi kelitbangan melalui berbagai kerjasama, pemberdayaan forum serta terobosan inovasi

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, di capai melalui beberapa program. Adapun untuk melihat keberhasilan dari capaian kinerja program dapat dilihat dari capaian indikator programnya. Indikator kinerja program yang mendukung sasaran strategis sebagaimana tersaji di dalam Renstra OPD, sebagaimana di tampilkan di dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan :			
		• S1	52%	52.63%	99.30%
		• S2	22%	33.33%	144.91%
		• S3	0%	0%	0%
		b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	85%	86.84%	102.17%
		c. Cakupan seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Lappeda	95%	100%	105.26%
2	Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/ Jumlah data yang dibutuhkan	85%	100%	117.65%
3	Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	1	2	200%
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%
		b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	65%	65%	100%

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian
		c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	70%	70%	100%
		d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	30%	35%	116.67%
		e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	74%	75%	101.35%
5	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%	100%
6	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%
7	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	100%	100%	100%

Analisis terhadap hasil capaian indikator capaian program tersebut di atas sebagai berikut:

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan Upaya yang dilakukan antara lain Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menghadirkan Tenaga Ahli dan Nara Sumber dengan sasaran para Kasubbag Program, Pejabat Eselon III dan II maupun Personil Bappeda sendiri.

Indikator dari program ini ada 3 yaitu sebagai berikut :

- a. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan

Pada tahun 2016 indikator aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan untuk S1 tidak mencapai target yang ditentukan . Dari target 53% telah mampu terrealisasi sebesar 52.63% dengan tingkat capaian hanya 99.30%. Dari total jumlah pegawai Bappeda yang mencapai 38 orang atau hanya 20 orang yang memiliki ijazah S1. Namun demikian untuk segmen S2 mencapai 33.33% dari

target 23% dengan tingkat capaian mencapai 144.91%. Tahun depan persentase personil S1 akan semakin berkurang karena sebagian personil yang sedang menempuh S2 akan selesai masa tugas belajarnya. Fenomena ini cukup baik untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana.

- b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran

Pada tahun 2016 sejumlah 33 orang dari 38 personil Bappeda mengikuti pelatihan ini. Artinya target sebesar 85% telah tercapai sebanyak 86,84% rasio pegawai yang mengikuti pelatihan ini. Beberapa pegawai tidak dapat mengikuti karena ada yang sedang cuti maupun sedang tugas belajar. Peningkatan kapasitas pegawai Bappeda tidak hanya terbatas pada yang di ikutkan pada pelatihan Perencanaan yang di laksanakan oleh Bappeda tapi melalui anggaran Bappeda atau anggaran dari Badan Kepegawaian kita mengirimkan personil untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat maupun bintek untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan personil perencanaan

- c. Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda

Dari total 3 target pelatihan telah mampu melebihi target yang sebesar 95% pada tahun 2016. Dengan tingkat capaian 105,26% maka diharapkan akan mampu mengangkat kinerja dan kemampuan aparat perencanaan bappeda untuk menopang core business perencanaan



Gambar 3.2

Workshop Perencanaan bagi personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk meningkatkan kapasitas karyawan

- Pengembangan Data/Informasi

Indikator dari program ini adalah Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/ Jumlah data yang dibutuhkan . Indikator ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD/Profil). Dari target sebesar 85% terlaksana sebesar 100 % mengingat data data yang telah diatur dalam SIPD dapat terisi dan terakomodir dengan baik. Tinggal bagaimana pemanfaatan data tersebut untuk kepentingan pengambilan kebijakan dan perencanaan Kota.



Gambar 3.3
Sistem Perencanaan Daerah Kota Magelang (SIIPD)

- Kerjasama Pembangunan

Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindak-lanjuti. Indikator dari program ini adalah Indikator ini menandakan bahwa hasil kegiatan FEDEP menghasilkan kerjasama antar stakeholders yang ditindaklanjuti. Terdapat 2 kerjasama dari 1 kerjasama yang dihasilkan. Artinya Tingkat capaian indikator ini mencapai 200%.

- Perencanaan Pembangunan Daerah

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator Tingkat konsistensi Penjabaran program RPJMD ke RKPD; Persentase Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir; Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui Musrenbang, Konsultasi Publik , Focus Group Discussion, serta melalui E-Aspiration dan E-Musrenbang sebagai inovasi proses perencanaan.

- a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Indikator ini menggambarkan konsistensi antara jumlah program yang terkaomodir ke dalam RKPD. Dari total 213 program dalam RPJMD 2016-2021 keseluruhannya telah masuk ke dalam RKPD dengan kata lain dari target 100% telah mencapai 100 %. Ke depan kinerja ini agar dapat di pertahankan dengan baik.
- b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir
Sebagaimana amanat Permendagri 54 Tahun 2010, pokok pikiran Dewan wajib dihadirkan sebagai bagian dari proses politik penyusunan RKPD. Dokumen ini akan diselaraskan ke dalam Rancangan RKPD hingga penetapannya. Dengan substansi yang memberikan ruang bagi Dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat, maka akomodasi atas pokok pikiran dewan menjadi bersifat mengikat, tentu saja setelah dilakukan penelaahaan atau verifikasi oleh OPD. Pada Tahun 2016 target akomodasi pokok pikiran dewan adalah 65% dan terakomodir sejumlah prosentase yang sama. Dari total pokok pikiran sebanyak 80 pokok pikiran, 52 diakomodir setelah ditelaah dan diverifikasi.
- c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir
Dengan definisi operasional Jumlah Kesepakatan Musrenbang yang diakomodir/Jumlah Kesepakatan, indikator ini pada tahun 2016 tercapai 70% dari target yang sama, artinya tingkat capaian indikator kinerja persentase BA Musrenbang yang terakomodir adalah 100%. Dari total 150 kesepakatanhasil Musrenbang 105 poin kesepakatan telah terakomodir dalam perencanaan.



Gambar 3.4
Pelaksanaan Musrenbang Kota Magelang Tahun 2016

d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik

Sebagai media menjangkau aspirasi masyarakat, peran konsultasi public menjadi sangat strategis, terutama dalam menyempurnakan rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2017. Dari 3 segmen yaitu segmen kelompok Umum, segmen Lansia dan segmen Anak sekolah, konsultasi public ini menghasilkan banyak sekali usulan yang layak dan sesuai dengan tema perencanaan sehingga mewarnai renja SKPD yang terlibat. Terbukti dari total 180 undangan terdapat 63 usulan yang dihasilkan. Sehingga target sebesar 30% dapat tercapai 35% atau kinerja mencapai 116%

e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir

Indikator ini diformulasikan dengan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir APBD/Jumlah usulan masyarakat. Pada tahun 2016 usulan dari usulan sebesar 213 telah diakomodir sejumlah 160 atau sekitar 75% dari target sebanyak 74%. Hal ini cukup menggembirakan mengingat bahwa penting bagi masyarakat terkait sumbang saran aspirasinya diakomodir untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintah.



Gambar 3.5

Pelaksanaan Konsultasi Publik yang melibatkan OPD, masyarakat, organisasi profesi dan Organisasi Masyarakat



Gambar 3.6
Pelaksanaan Konsultasi Publik yang melibatkan Lansia dan Anak sekolah



Gambar 3.7
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam Penyusunan RKPD
Pemerintah Kota Magelang yang melibatkan OPD, Masyarakat, Elemen
Masyarakat, Organisasi masyarakat dan Organisasi Profesi

f. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya

Sebagai perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kinerja perencanaan di segala aspek mutlak diperlukan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi, fisik prasarana dan sosial Budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Ekonomi. dalam case Bappeda Magelang seluruh kegiatan ini sudah dilakukan dan capaian mencapai masing masing 100 %.



Gambar 3.8
FGD Penyusunan Dokumen Penyusunan Masterplan Smart City



Gambar 3.9
Implementasi dari Penyusunan Dokumen Urban Farming

3.2 Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran strategis dari OPD pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2016 untuk Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh 14 Program dan 77 Kegiatan.

Program yang masuk di dalam urusan ini selain Program-program yang masuk dalam urusan perencanaan pembangunan juga termasuk di dalamnya program pendukung /program kegiatan yang ada dan di laksanakan di tiap OPD (seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan).

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.900.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.128.573.069,- atau sebesar 91.32%. Realisasi tahun 2016 sedikit lebih di bandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar 86.62%. Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

Belanja Daerah	Realisasi Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi Anggaran 2016 (Rp)	(%) serapan anggaran
BELANJA DAERAH	8.900.800.000,-	8.128.573.069,-	91.32%
1, Belanja Tidak Langsung	2.370.618.000,-	2.186.847.368,-	92.25%
Belanja Pegawai	2.370.618.000,-	2.186.847.368,-	92.25%
2. Belanja Langsung	6.530.182.000,-	5.941.725.701,-	90.99%
Belanja Pegawai	1.875.659.000,-	1.746.984.000,-	93.14%
Belanja Barang dan Jasa	4.361.071.000,-	3.911.653.701,-	89.70%
Belanja Modal	293.452.000,-	283.088.000,-	96.47%
JUMLAH BELANJA	8.900.800.000,-	8.128.573.069,-	

Sumber : Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Bappeda Tahun 2016, data di olah

Capaian Output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2016 hampir seluruhnya sebesar 100%, hanya terdapat satu kegiatan dengan capaian realisasi fisik sebesar 75% sehingga capaian realisasi fisik kegiatan tahun 2016 yaitu sebesar 99.68%. Adapun capaian realisasi anggaran tahun 2016 mencapai 91.32%. Apabila dibandingkan dengan capaian/realisasi anggaran pada tahun sebelumnya terdapat peningkatan. Adapun capaian pada tahun 2015 sebesar 86.62%. Realisasi capaian pada tahun 2016 terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar 92.25% dan realisasi belanja langsung 90.99% (realisasi belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 84.95%).

Kegiatan yang capaian/realisasi fisiknya tidak mencapai 100% pada tahun 2016 adalah kegiatan Kerja sama pengelolaan sampah antar daerah. Adapun alasan tidak tercapainya realisasi fisik sebesar 100% adalah karena tidak tercapainya output kegiatan yang menghasilkan 1 MOU pengelolaan sampah regional antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang. Sampai dengan akhir tahun, kegiatan ini masih berupa draft akhir MoU, namun belum di tanda tangani oleh pihak terkait (Dirjen PLP, Gubernur Jateng, Bupati Magelang dan Walikota Magelang)

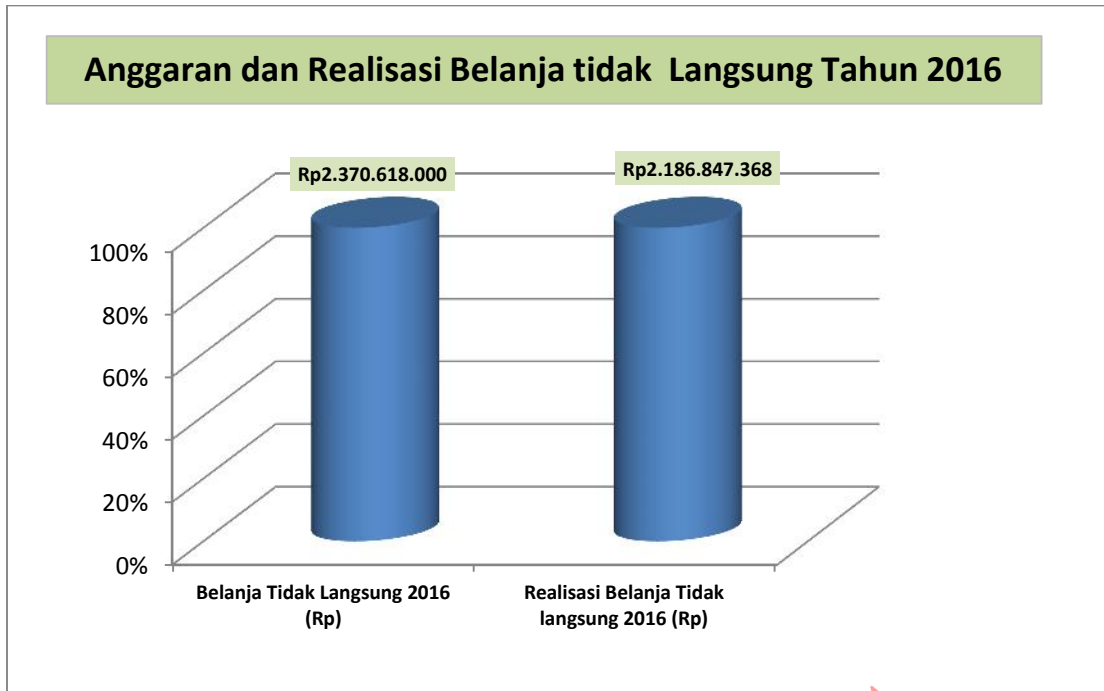


Gambar 3.10 Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Realisasi belanja tidak langsung/belanja pegawai yang serapannya sebesar 90.93% disebabkan beberapa hal diantaranya :

- a). Adanya akses yang ditambahkan pada setiap komponen gaji pegawai padahal jumlah pegawai Bappeda yang aktif berkurang karena ada beberapa pegawai yang menjalankan tugas belajar;
- b). Adanya jabatan struktural yang belum terisi (1. jabatan eselon IV yang masih tugas belajar);
- c). Adanya 7 orang karyawan Bappeda yang sedang mengikuti tugas belajar namun per-hitungan dari DPPKD untuk tunjangan fungsional umum dan tunjangan tambahan penghasilan PUS masih diperhitungkan sehingga pada realisasinya menjadi SILPA

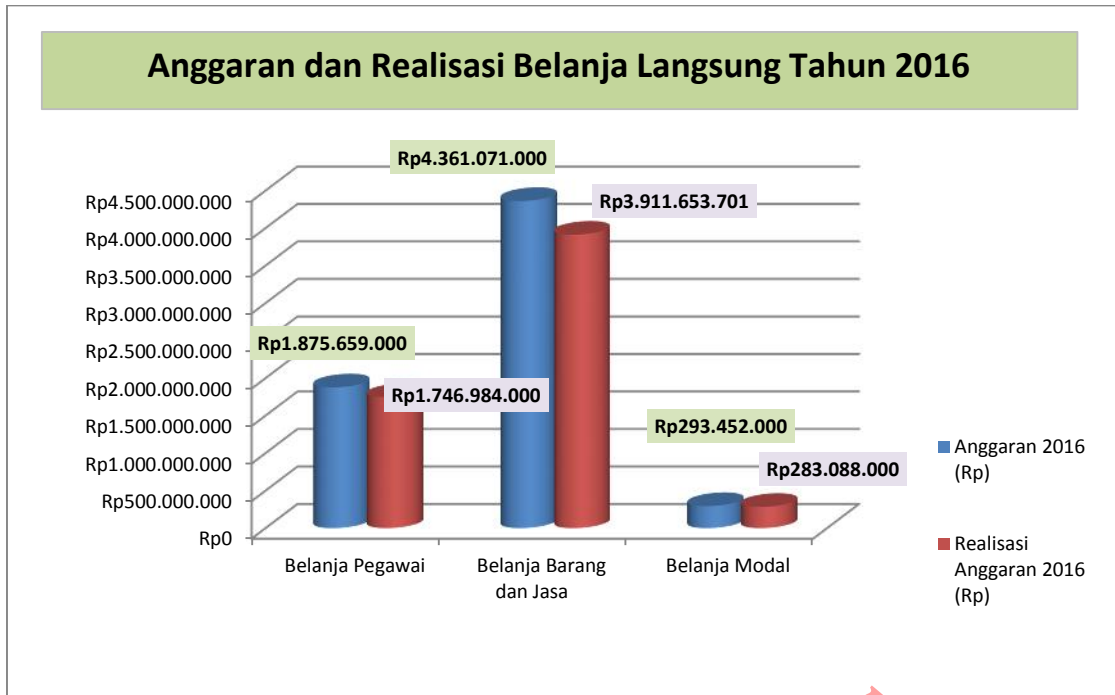
Gambar di bawah ini memperlihatkan realisasi tidak belanja tidak langsung atau belanja gaji pegawai sebagai berikut :



Gambar 3.11
 Realisasi Serapan Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2016
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Secara keseluruhan beberapa hal yang menyebabkan Realisasi serapan anggaran untuk belanja langsung sebesar 91,92% diantaranya adalah sebagai berikut:

- a). efisiensi anggaran/ penggunaan anggaran sesuai kebutuhan;
- b). adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi serapan anggaran sehingga anggaran kegiatan tidak bisa diserap secara maksimal;
- c). Schedull Penetapan Perubahan APBD tahun 2016 mundur dari yang sudah direncanakan menyebabkan Perencanaan anggaran kegiatan yang telah di susun di dalam DPA Perubahan tidak bisa di cairkan sepenuhnya sehingga menjadi SILPA kegiatan (seperti kegiatan baru di perubahan untuk belanja pegawai/ honorarium kegiatannya hanya bisa di cairkan separuhnya saja);
- d). Adanya beberapa efisiensi belanja pemeliharaan seperti pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, di mana penggunaan dari anggaran tersebut tidak bisa di prediksi secara pasti penggunaan hanya di dasarkan pada realisasi anggaran pada tahun sebelumnya
- e). Realisasi belanja pengadaan baik belanja modal atau jasa pihak ke tiga yang penawarannya di bawah pagu yang telah di anggarkan pada DPA.



Gambar 3.12 Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Adapun SILPA Tahun 2016 sebesar Rp. 772.226.931,- atau sebesar 8.68%. (SILPA pada tahun 2016 sedikit rendah apabila dibandingkan dengan SILPA tahun 2015 yaitu sebesar 1.083.180.429,- atau sebesar 13.38% .

Tabel 3.6 SILPA Tahun Anggaran 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Belanja Daerah	Anggaran 2016 (Rp)	SILPA 2016 (Rp)	(%) SILPA
BELANJA DAERAH	8.900.800.000,-	772.226.931, 00	8.68%
1, Belanja Tidak Langsung	2.370.618.000,-	183.770.632, 00	7.75 %
Belanja Pegawai	2.370.618.000,-	183.770.632, 00	7.75 %
2. Belanja Langsung	6.530.182.000,-	586.456.299, 00	8.98%
Belanja Pegawai	1.875.659.000,-	128.675.000, 00	6.86%
Belanja Barang dan Jasa	4.361.071.000,-	449.417.299, 00	10.31%
Belanja Modal	293.452.000,-	10.364.000, 00	3.53%
JUMLAH BELANJA	8.900.800.000,-	772.226.931, 00	

Sumber : Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Bappeda Tahun 2016, data di olah

Rincian SILPA untuk belanja tidak langsung ada di komponen Belanja gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan sebesar Rp. 183.770.632, 00,- (7.75 %). SILPA pada belanja tidak langsung disebabkan karena adanya akses yang ditambahkan di tiap komponen belanja gaji serta adanya 7 karyawan Bappeda yang mengikuti Tugas Belajar sehingga anggaran belanja tidak langsung tersebut tidak bisa dicairkan secara maksimal

Adapun Rincian SILPA untuk belanja langsung sebesar 8.98%, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Beberapa alasan terkait adanya SILPA untuk belanja langsung di antaranya :

- a). belanja honorium pegawai yang tidak dapat di cairkan seluruhnya karena beberapa hal secara teknis yang menyebabkan anggaran tidak dapat di serap sepenuhnya seperti anggaran menyesuaikan dengan jumlah anggota tim yang ada di dalam SK Kegiatan atau karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan sehingga sisa anggaran belanja honorarium kegiatan yang tidak dipergunakan tidak dapat di geserkan pada perubahan APBD;
- b. Adanya SILPA pada belanja barang dan jasa, di antaranya karena adanya efisiensi anggaran yang dipergunakan sesuai kebutuhan, adanya perubahan dan percepatan penyelesaian schedull kegiatan yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran atau adanya penawaran pihak ketiga atas belanja barang dan jasa yang realisasinya di bawah pagu anggaran yang direncanakan di dalam DPA;
- c. Adanya SILPA pada belanja Modal yang disebabkan karena realisasi belanja modal di bawah pagu anggaran yang di rencanakan di dalam DPA

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2016 terhadap Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015

Belanja Daerah	Realisasi Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi Anggaran 2016 (Rp)
BELANJA DAERAH	7.011.568.571,-	8.128.573.069,-
1, Belanja Tidak Langsung	2.055.729.301,-	2.186.847.368,-
Belanja Pegawai	2.055.729.301,-	2.186.847.368,-
2. Belanja Langsung	4.955.839.270,-	5.941.725.701,-
Belanja Pegawai	1.511.150.000,-	1.746.984.000,-
Belanja Barang dan Jasa	3.171.414.290,-	3.911.653.701,-
Belanja Modal	273.274.980,-	283.088.000,-
JUMLAH BELANJA	8.900.800.000,-	8.128.573.069,-

Sumber : Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Bappeda Tahun 2015 dan 2016, data di olah

Hal – hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan di sesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

Hal yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah terkait realisasi belanja langsung mengingat selama lima tahun terakhir realisasi serapan anggarannya mengalami trend yang terus menurun. Walaupun penurunan realisasi serapan belanja langsung juga di subsidi dengan adanya beberapa efisiensi yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran belanja langsung namun hal ini menunjukkan kurang cermatnya perencanaan anggaran belanja. Beberapa permasalahan terkait penyerapan anggaran belanja langsung di antaranya adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul pada saat Perubahan APBD sedangkan waktu ditetapkannya Perubahan APBD tersebut mengalami kemunduran waktu sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan hal ini berimbas pada proses penyerapan anggaran belanja. Hal lain yang menjadi permasalahan penyerapan belanja langsung di antaranya :

1. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan maupun anggaran kas bulanan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang sudah di anggarakan pada triwulan awal padahal kegiatan baru dimulai pada triwulan berikutnya atau bahkan sebaliknya;
2. Perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan yang terdapat di DPA atau anggaran kas yang sudah di inputkan ke dalam SIMDA belum sepenuhnya sesuai dengan schedull kegiatan;
3. Realisasi fisik kegiatan yang tidak di ikuti dengan realisasi serapan dana kegiatan sehingga terdapat gap antara realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran. Pelaksanaan kegiatan belum di ikuti oleh serapan dana kegiatan sehingga ada ketimpangan antara capaian realisasi fisik dan capaian realisasi serapan anggaran. Hal ini menyebabkan target serapan anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat terserap;
4. Terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan – kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai

dengan target dan schedull yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan;

5. adanya pergeseran kode rekening belanja dalam kegiatan sehingga serapan dana dan Peng-SPJ-an dari kegiatan tersebut menunggu APBD Perubahan ditetapkan;
6. Belum adanya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kegiatan – kegiatan terkait dokumen perencanaan atau kegiatan kajian yang biasa dilaksanakan oleh Badan Perencanaan sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Perlu kecermatan di dalam menghitung kebutuhan anggaran kegiatan sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan/mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dalam laporan pertanggungjawaban.

Selain hal tersebut di atas perlu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal – hal yang perencanaan dan di anggaran merupakan perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis program dan harapannya realisasi penganggaran akan mengalami trend yang meningkat sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun

Secara terperinci di bawah ini di sajikan tabel serapan anggaran per kegiatan pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

No	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596,610,000	575.002.412	96.38
1	Penyediaan jasa surat menyurat	625,000	222.000	35.52
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76,800,000	72.059.392	93.83
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7,050,000	4.280.825	60.72
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125,725,000	123.028.100	97.85
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	59,246,000	57.114.800	96.40
6	Penyediaan alat tulis kantor	15,058,000	12.384.200	82.24

No	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34,844,000	32.200.175	92.41
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	4.592.700	91.85
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	3,571,000	3.095.000	86.67
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,520,000	5.520.000	100
11	Penyediaan bahan logistik kantor	1,450,000	926.000	63.86
12	Penyediaan makanan dan minuman	25,900,000	23.976.000	92.57
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	179,530,000	179.431.880	99.95
14	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	56,291,000	56.171.340	99.79
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	771,906,000	716.373.189	92.81
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19,430,000	16.380.000	84.30
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	62,060,000	57.853.000	93.22
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	217,425,000	208.337.500	95.82
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178,060,000	159.659.639	89.67
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	29,856,000	29.141.050	97.61
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71,015,000	53.212.000	74.93
21	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	2.900.000	96.67
22	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	191,060,000	188.890.000	98.86
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	81,510,000	75.878.100	93.09
23	Workshop perencanaan pembangunan daerah	53,750,000	51.751.000	96.28
24	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	27,760,000	24.127.100	86.91
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54,149,000	48.163.100	88.96

No	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,482,000	11.497.000	92.11
26	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8,530,000	7.534.000	88.32
27	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,429,000	7.927.000	94.04
28	Penyusunan RKA-SKPD	18,973,000	16.531.100	87.13
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD	5,735,000	4.674.000	81.50
	Program Pengembangan data/informasi	120,488,000	110.946.520	92.08
30	Penyusunan Profile Daerah	120,488,000	110.946.520	92.08
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46,161,000	39.380.000	85.31
31	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah	46,161,000	39.380.000	85.31
	Program Pengembangan Perumahan	236,679,000	230.171.800	97.25
32	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	236,679,000	230.171.800	97.25
	Program Perencanaan Tata Ruang	500,413,000	510.051.549	91.01
33	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	285,917,000	273.198.881	95.55
34	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	200,734,000	172.670.468	86.02
35	Review Raperda RTRW Kota Magelang	73,762,000	64.182.200	87.01
	Program Kerjasama Pembangunan	575,786,000	521.036.300	90.49
36	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	575,786,000	521.036.300	90.49
	Program perencanaan pembangunan daerah	2,097,416,000	1.848.115.675	88.11
37	Penyusunan rancangan RPJMD	305,202,000	290.363.625	95.14
38	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	69,580,000	43.330.000	62.27
39	Penyusunan rancangan RKPD	293,328,000	264.734.500	90.25
40	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	109,200,000	94.039.000	86.12
41	Penetapan RKPD	34,855,000	30.968.250	88.85

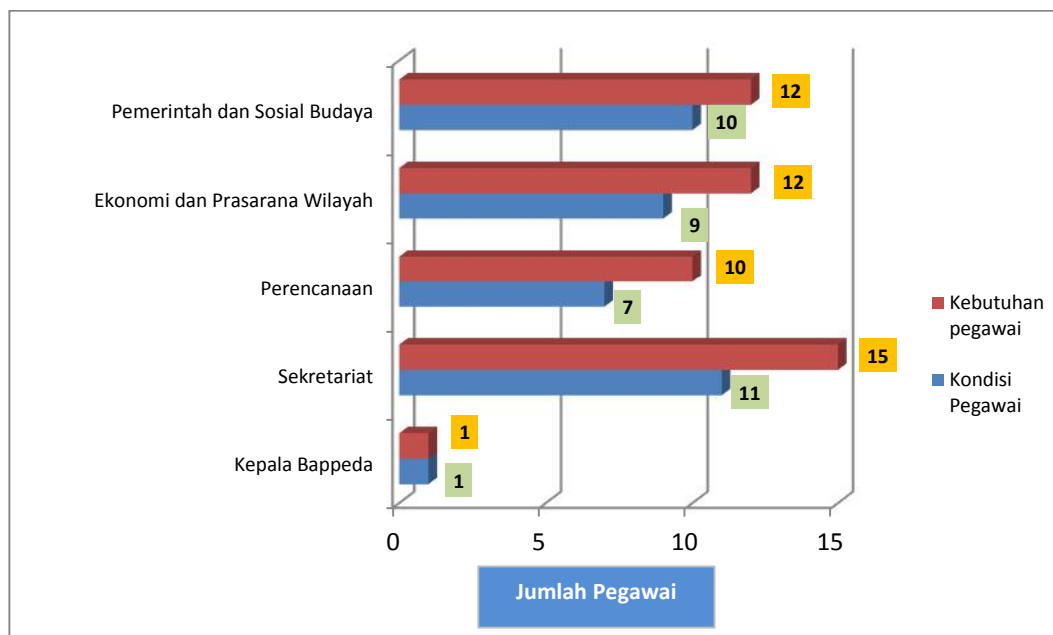
No	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
42	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	16,565,000	14.524.800	87.68
43	Forum SKPD dan FGD	109,718,000	93.706.900	85.41
44	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	33,665,000	30.442.250	90.43
45	Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD	71,384,000	61.442.250	86.40
46	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPDP	120,900,000	107.590.000	88.99
47	Penetapan Perubahan RKPDP	29,305,000	24.101.000	82.24
48	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	70,904,000	62.640.000	88.34
49	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	81,059,000	70.522.000	87.00
50	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Gunung Tidar	183,978,000	161.978.100	88.04
51	Pengendalian dan Evaluasi RKPDP	39,445,000	34.965.650	88.64
52	Konsultasi Publik RPJMD	44,209,000	32.160.000	72.60
53	Forum SKPD dan FGD RPJMD	53,038,000	39.960.000	75.34
54	Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD	72,554,000	53.817.000	74.18
55	Penetapan indikator kinerja RPJMD	62,070,000	56.750.000	91.43
56	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	129,940,000	127.890.000	98.42
57	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	13,695,000	11.356.000	82.92
58	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10,242,000	8.552.500	83.50
59	Sosialisasi RPJMD Kota Magelang	69,845,000	65.579.000	93.89
60	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Air Minum Daerah (Jakstrada)	72,645,000	66.471.600	91.50
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	298,174,000	279.623.000	93.78
61	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	7,890,000	3.888.000	49.28
62	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12,160,000	8.616.500	70.86
63	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	142,605,000	136.403.000	95.65

No	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
64	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura	135,519,000	130.715.500	96.46
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	563,742,000	493.683.910	87.57
65	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	13,043,000	12.111.910	92.86
66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16,340,000	14.765.000	90.36
67	Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	100,467,000	83.753.000	86.36
68	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PUS)	97,257,000	83.081.500	85.42
69	Perencanaan Pengembangan Olahraga	201,750,000	190.842.000	94.59
70	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	71,030,000	45.809.000	64.49
71	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	63,855,000	63.321.500	99.16
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	20,000,000	19.954.000	99.77
72	Pemeliharaan RTH	20,000,000	19.954.000	99.77
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	527,148,000	473.346.146	93.33
73	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	32,469,000	25.480.250	78.48
74	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	14,640,000	9.969.000	68.09
75	Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman	165,770,000	165.545.496	99.86
76	Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity	221,206,000	209.602.000	94.75
77	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah	73,063,000	62.749.400	85.88

Sumber : Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Bappeda Tahun 2016, data di olah

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis terhadap penggunaan sumber daya khususnya terkait dengan sumber daya aparatur dapat di lihat dari perbandingan kebutuhan karyawan pada Bappeda Kota Magelang dengan kondisi karyawan pada saat ini. Capaian tersebut dapat di lihat pada grafik di bawah ini sebagai berikut :



Gambar 3.13 Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

Terkait dengan sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2016 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9 Total Aset Bappeda Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Total Aset Intrakompatibel	
	a. Aset Intrakompatibel	Rp. 5.048.453.139,66
	b. Aset Lainnya Intrakompatibel	Rp. 1.367.401.933,34
	Aset Ekstrakompatibel	
	a. Aset Ekstrakompatibel	Rp. 95.277.850, 00
	b. Aset Lainnya Ekstrakompatibel	Rp. 3.991.300, 00

Sumber : Laporan Barang Semester 2 Bappeda Tahun tahun 2016

Di bawah ini di sajikan data asset intrakompatibel yang terdiri dari asset – asset Bappeda yang tercatat di dalam Neraca dan Laporan Keuangan, di mana angka dari asset tersebut di atas nilai kapitalisasi dari suatu asset yang dikelola oleh daerah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.10 Daftar Realsiasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2016

NO	URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016						SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN			PENGURANGAN			
			BLM TERCATAT NERACA	HIBAH	BM	REKLASIFIKAS I	KAPITALISASI	SK SEKDA	
1	Tanah	-							-
2	Alat Berat	3,351,000.00	-	-	-	-	-	-	3,351,000.00
3	Alat Angkutan	904,648,830.00	-	-	-	-	-	-	904,648,830.00
4	Alat Bengkel	-							-
5	Alat Pertanian dan Peternakan	-							-
6	Alat Kantor dan RT	1,886,401,139.66	5,050,000.00	13,354,871.00	74,233,000.00		-	-	1,979,039,010.66
7	Alat Studio dan Kom	2,658,000.00	-	-	-	-	-	-	2,658,000.00
8	Alat Ukur	12,380,000.00							12,380,000.00
9	Alat Kedokteran	-		8,205,129.00					8,205,129.00
10	Alat Laboratorium	-							-
11	Alat Keamanan	9,682,860.00							9,682,860.00
12	Bangunan Gedung	1,925,630,900.00	-	-	188,890,000.00	40,860,000.00	40,860,000.00	-	2,114,520,900.00
13	Bangunan Monumen	-							-
14	Jalan dan Jembatan	-							-
15	Bangunan Air (irigasi)	-		5,842,860.00					5,842,860.00
16	Instalasi	-							-
17	Jaringan	-							-
18	Buku Perpustakaan	4,649,550.00	-						4,649,550.00
19	Barang Bercorak Kebudayaan	3,475,000.00							3,475,000.00
20	Hewan/ternak, Tanaman dan Taman	-							-
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	-							-
	Jumlah	4,752,877,279.66	5,050,000.00	27,402,860.00	263,123,000.00	40,860,000.00	40,860,000.00	-	5,048,453,139.66

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda tahun 2016

PENCAPAIAN KINERJA

Secara substantif Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 yang terepresentasikan melalui capaian kinerja dari program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran – sasaran strategis, dapat di lihat pada tabel 3.11 di bawah ini

Tabel 3.11 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BAPPEDA									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596,610,000	575,002,412							
Penyediaan jasa surat menyurat	625,000	222,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Terkirimnya surat			12	12	bulan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terciptanya kelancaran komunikasi						100	100	%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76,800,000	72,059,392							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Layanan jasa komunikasi via telepon, dan layanan listrik			2	2	item				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Tersedianya jasa komunikasi listrik dan internet kantor						100	100	%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7,050,000	4,280,825							

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional			27	27	unit				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Adanya kendaraan yang perijinannya sudah dilaksanakan						100	100	%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	125,725,000	123,028,100							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Honorarium pengelolaan keuangan daerah dan tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan Bappeda			11 24	11 24	orang bendel SPJ				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Bappeda						100	100	%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	59,246,000	57,114,800							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya peralatan, bahan pembersih kantor, jasa tenaga kebersihan gedung kantor dan lingkungan kantor dan jasa kebersihan serta perawatan taman			31 4	31 4	item bendel SPJ				

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat						100	100	%	
Penyediaan alat tulis kantor	15,058,000	12,384,200							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah ATK			31	31	item				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor						100	100	%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34,844,000	32,200,175							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Terlaksananya kegiatan cetakan, fotocopy dan jilid administrasi perkantoran			3	3	jenis				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjilidan						100	100	%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	4,592,700							

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			14	14	item				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran						100	100	%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	3,571,000	3,095,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jenis peralatan rumah tangga			8	8	jenis				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
tersedianya peralatan rumah tangga						100	100	%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,520,000	5,520,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jasa pelayanan surat kabar bulanan			5	5	jenis				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan karyawan melalui jasa layanan surat kabar						100	100	%	
Penyediaan bahan logistik kantor	1,450,000	926,000							

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Penyediaan isi ulang tabung gas			14	14	kali				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Tersedianya kebutuhan gas						100	100	%	
Penyediaan makanan dan minuman	25,900,000	23,976,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jamuan makan/minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai			12	12	bulan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Tersedianya jamuan makan/minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai						100	100	%	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	179,530,000	179,431,880							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Pelaksanaan perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 1 tahun anggaran			12	12	bulan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 1 tahun anggaran						100	100	%	

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	56,291,000	56,171,340							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Belanja jasa tenaga kontrak/tenaga tidak tetap/penjaga malam dan operator telepon			3	3	orang				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi						100	100	%	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	771,906,000	716,373,189							
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	19,430,000	16,380,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
BM pengadaan tangga lipat multifungsi, rak arsip, AC ruang rapat			4	4	jenis				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
tersedianya tangga lipat multifungsi, rak arsip, AC ruang rapat						100	100	%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	62,060,000	57,853,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
BM LED Proyektor, CPU, alat perekam suara, amplifier			6	6	jenis				

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Tersedianya LED Proyektor, CPU, alat perekam suara, amplifier						100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	217,425,000	208,337,500							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jenis pemeliharaan gedung kantor, aula dan lingkungan gedung kantor			2	2	jenis				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya pemeliharaan gedung aula dan lingkungan kantor						100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178,060,000	159,659,639							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor			27	27	unit				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Pelaksanaan pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas operasional selama 1 tahun anggaran						100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	29,856,000	29,141,050							
<u>Keluaran (Output) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			11	11	item				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan baik selama 1 tahun						100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71,015,000	53,212,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Belanja jasa pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan jaringan			14	14	item				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan jaringan dengan baik selama 1 tahun						100	100	%	
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	2,900,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Belanja jasa pemeliharaan mebelair			4	4	item				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terpeliharanya pemeliharaan mebelair kantor dengan baik selama 1 tahun						100	100	%	

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	191,060,000	188,890,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Luasan gedung kantor yang direhab (kamar mandi, gudang, ruang rapat, pantry, ruang laktasi)			5,978	5,978	m2				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya rehab gedung kantor yang direhab (kamar mandi, gudang, ruang rapat, pantry, ruang laktasi)						100	100	%	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD									
	81,510,000	75,878,100							
Workshop perencanaan pembangunan daerah	53,750,000	51,751,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Peserta yang mengikuti workshop perencanaan			41	41	orang				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Peserta memahami perencanaan pembangunan daerah						100	100	%	
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	27,760,000	24,127,100							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan			350	350	orang				

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Aparatur perencana yang tersosialisasi						100	100	%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54,149,000	48,163,100							
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,482,000	11,497,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD			12	12	laporan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD						100	100	%	
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8,530,000	7,534,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Adanya laporan prognosis dan realisasi anggaran			6	6	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya tertib administrasi keuangan						100	100	%	

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,429,000	7,927,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun			5	5	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terselenggaranya tertib administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan						100	100	%	
Penyusunan RKA-SKPD	18,973,000	16,531,100							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Dokumen RKA dan RKPA			2	2	jenis dokumen				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan yang baik dalam rangka pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						100	100	%	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	5,735,000	4,674,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya dokumen LLKjIP Bappeda			1	1	laporan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD						100	100	%	
Program Pengembangan data/informasi	120,488,000	110,946,520							
Penyusunan Profile Daerah	120,488,000	110,946,520							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya buku profil/SIPD Kota Magelang dan per kecamatan Tahun 2016			100	100	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya updating data di dalam Profile Kota Magelang						100	100	%	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46,161,000	39,380,000							
Kerja sama pengelolaan sampah antar daerah	46,161,000	39,380,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Adanya MoU koordinasi untuk kerja sama pengelolaan sampah dengan Kabupaten Magelang			1	0	Mou				Sampai dengan akhir tahun, kegiatan ini masih berupa draft akhir MoU, namun belum di tanda tangani oleh pihak terkait (Dirjen PLP, Gubernur Jateng, Bupati Magelang dan Walikota Magelang)
<u>Hasil (Outcome) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya acuan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk pelaksanaan pembangunan TPA Regional Kota Magelang						100	75	%	
Program Pengembangan Perumahan	236,679,000	230,171,800							
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	236,679,000	230,171,800							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Terfasilitasinya program PLPBK			1	1	paket				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program PLPBK						100	100	%	
Program Perencanaan Tata Ruang	560,413,000	510,051,549							
Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	285,917,000	273,198,881							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen Raperda RDTRK BWP 4, 3 dan 5			45	45	dokumen				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya dokumen Raperda RDTRK BWP 3 dan 5 sebagai bahan pembahasan di propinsi						100	100	%	
Koordinasi Penataan Ruang Daerah	200,734,000	172,670,468							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
jumlah koordinasi yang dilakukan oleh tim BKPRD			12	12	bulan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terselenggaranya koordinasi tim BKPRD dengan baik						100	100	%	
Review raperda RTRW Kota Magelang	73,762,000	64,182,200							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen evaluasi RTRW Tahun 1			10	10	dokumen				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya evaluasi RTRW Tahun 1						100	100	%	
Program Kerjasama Pembangunan	575,786,000	521,036,300							
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	575,786,000	521,036,300							
<u>Keluaran (Output) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah rakor FEDEP, PEL dan Pameran			11	10	kali				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Peningkatan potensi, sumber daya dan daya saing umkm						100	100	%	
Program perencanaan pembangunan daerah	2,097,416,000	1,848,115,675							
Penyusunan rancangan RPJMD	305,202,000	290,363,625							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen rancangan awal dan dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2015-2019			200	200	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kota Magelang Tahun 2015-2019						100	100	%	
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	69,580,000	43,330,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya naskah kesepakatan musrenbang RRPD			1	1	jenis dokumen				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya komitmen antar stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kota Magelang						100	100	%	
Penyusunan rancangan RKP	293,328,000	264,734,500							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah buku rancangan awal RKP Kota Magelang dan Rancangan Kota Magelang			300	300	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Dokumen Rancangan awal dan akhir RKP Tahun 2017 Kota Magelang						100	100	%	
Penyelenggaraan musrenbang RKP	109,200,000	94,039,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKP Kota Magelang Tahun 2016			2	2	kegiatan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Kesepakatan rancangan RKP di semua stakeholder						100	100	%	
Penetapan RKP	34,855,000	30,968,250							

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya buku RKP Kota Magelang			150	150	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Magelang dengan baik						100	100	%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	16,565,000	14,524,800							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Monev)			4	4	laporan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Monev)						100	100	%	
Forum SKPD dan FGD	109,718,000	93,706,900							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Terselenggaranya Forum SKPD dan forum diskusi			200	200	orang				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya perencanaan di Kota Magelang yang dapat mengakomodasi usulan dari stakeholder di Kota Magelang						100	100	%	
Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	33,665,000	30,442,250							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya poster dan kalender sebagai alat publikasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah			20 150	20 150	poster kalender				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terpublikasinya kegiatan perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang						100	100	%	
Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD	71,384,000	61,673,500							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen Renja yang akan diverifikasi			46	46	dokumen SKPD				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya verifikasi Renja SKPD						100	100	%	
Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	120,900,000	107,590,000							

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen rancangan perubahan RKP			100	100	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Magelang dengan baik						100	100	%	
Penetapan Perubahan RKP	29,305,000	24,101,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya buku penetapan perubahan RKP Kota Magelang			150	150	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang dengan baik						100	100	%	
Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	70,904,000	62,640,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen Renja yang akan diverifikasi			46	46	dokumen SKPD				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya verifikasi Renja SKPD						100	100	%	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	81,059,000	70,522,000							

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi Magelang Kota Sejuta Bunga			50	50	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Tercapainya target indikator program pembangunan Magelang Kota Sejuta Bunga						100	100	%	
Pengendalian dan Evaluasi RKP	39,445,000	34,965,650							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi RKP			4	4	laporan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Laporan pengendalian dan evaluasi RKP						100	100	%	
Konsultasi Publik RPJM	44,299,000	32,160,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Terlaksananya konsultasi publik RPJM			3	3	kegiatan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terakomodasinya aspirasi publik dari kalangan umum, lansia dan pelajar dalam rangka penyusunan RPJM						100	100	%	

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Forum SKPD dan FGD RPJMD	53,038,000	39,960,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah peserta yang mengikuti Forum SKPD dan FGD RPJMD			200	200	peserta				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang jangka menengah						100	100	%	
Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD	72,554,000	53,817,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen Renstra yang akan diverifikasi			46	46	dokumen SKPD				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya verifikasi Renstra SKPD						100	100	%	
Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	62,070,000	56,750,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya dokumen indikator kinerja daerah RPJM Kota Magelang			50	50	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya kegiatan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang						100	100	%	
Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	129,940,000	127,890,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya dokumen KLHS RPJMD sebagai sarana untuk arahan terhadap kebijakan rencana program dalam raperda			20	20	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya kajian lingkungan hidup dalam RPJMD						100	100	%	
Penyusunan Rencana Strategis SKPD	13,695,000	11,356,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD			1	1	jenis dokumen				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Magelang						100	100	%	
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10,242,000	8,552,500							

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya dokumen renja Bappeda tahun 2017 dan perubahan renja 2016			2	2	jenis dokumen				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan Bappeda Kota Magelang dengan baik						100	100	%	
Sosialisasi RPJMD Kota Magelang	69,845,000	65,579,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah peserta sosialisasi RPJMD			200	200	orang				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya peserta sosialisasi RPJMD						100	100	%	
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Air Minum Daerah	72,645,000	66,471,600							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen Jakstrada			10	10	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terencana kebijakan dan strategi dalam penanganan air minum						100	100	%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Gunung Tidar	183,978,000	161,978,100							

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan gunung tidar			35	35	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya kawasan gunung tidar menjadi wisata alam, wisata religius dan wisata edukasi di Kota Magelang						100	100	%	
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	298,174,000	279,623,000							
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	7,890,000	3,888,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah koordinasi bidang ekonomi			7	7	kegiatan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terkoordinasinya rencana pembangunan bidang ekonomi yang berbasis pada ekonomi kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan						100	100	%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12,160,000	8,616,500							
<u>Keluaran (Output) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah laporan hasil monev dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi			12	12	laporan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan target indikator kinerja						100	100	%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	142,605,000	136,403,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan urban farming			30	30	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya budidaya pertanian di lahan sempit baik secara verticultur, hidroponik maupun vertiminaponik						100	100	%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura	135,519,000	130,715,500							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan florikultur			35	35	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya budidaya bunga dan tanaman hias di Kota Magelang						100	100	%	

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	563,742,000	493,683,910							
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	13,043,000	12,111,910							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Frekuensi koordinasi bidang sosial budaya			12	12	kali				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Peningkatan koordinasi bidang sosial budaya						100	100	%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16,340,000	14,765,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Laporan hasil Monev dan pelaporan bidang sosial budaya			12	12	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terpantaunya capaian kinerja dan target pembangunan bidang sosial budaya tercapai						100	100	%	
Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	100,467,000	83,753,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya laporan penanggulangan kemiskinan			36	36	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya penurunan angka kemiskinan Kota Magelang						100	100	%	
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	97,257,000	83,081,500							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Buku laporan hasil monev pendidikan untuk semua			50	50	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Tersedianya buku laporan hasil Monev PUS						100	100	%	
Perencanaan Pengembangan Olah Raga	201,750,000	190,842,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan keolahragaan Kota Magelang			30	30	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan pengembangan keolahragaan Kota Magelang						100	100	%	

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	71,030,000	45,809,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Laporan kegiatan koordinasi dan pembinaan penanganan GAKY			4	4	laporan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Menurunnya angka kejadian GAKY di Kota Magelang						100	100	%	
Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	63,855,000	63,321,500							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah			25	15	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah						100	100	%	
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	20,000,000	19,954,000							
Pemeliharaan RTH	20,000,000	19,954,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah taman lingkungan kantor yang terawat dan terpelihara			1	1	paket				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya keindahan dan keasrian taman lingkungan kantor						100	100	%	
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	507,148,000	473,346,146							
Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	32,469,000	25,480,250							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
frekuensi koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana			12	12	kali				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terlaksananya pembangunan bidang fisik dan prasarana sesuai dengan target indikator kinerja						100	100	%	
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	14,640,000	9,969,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Laporan hasil Monev dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana			12	12	laporan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya pembangunan bidang fisik dan prasarana sesuai dengan target indikator kinerja						100	100	%	

PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman	165,770,000	165,545,496							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah sistem informasi yang lingkungan permukiman yang terdata			3	3	kecamatan				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Tersedianya informasi lingkungan dan permukiman Kota Magelang						100	100	%	
Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity	221,206,000	209,602,000							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Jumlah dokumen smartcity			10	10	dokumen				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan Kota Magelang sebagai smart city						100	100	%	
Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah	73,063,000	62,749,400							
<u>Keluaran (Output) :</u>									
Tersedianya dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah 2016-2021			10	10	buku				
<u>Hasil (Outcome) :</u>									
Terwujudnya perencanaan investasi jangka menengah Kota Magelang						100	100	%	

KUMEN KOTA MAGELANG



BAB. IV PENUTUP

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah di uraikan pada Bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang pada tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2016 di ukur dari 2 kinerja sasaran strategis di dalam misi pertama RPJMD yaitu sasaran terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel dan sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun kedua sasaran tersebut mempunyai empat indikator kinerja a). Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c). Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dan d). Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.
- b. Capaian untuk sasaran pertama dapat di lihat dari indikator kinerja sasaran yaitu Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2016 realisasi kinerja indikator sasaran ini mencapai 89% dari target 88 % yang ditetapkan pada tahun 2016 sehingga capaiannya sebesar 101.14%. Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, realisasinya sebesar 100%. Implikasi dari indikator ini melibatkan Profil Daerah (di Bappeda) dan Data Go (Dinskominsta). Untuk Profil daerah (SIPD).

Capaian untuk sasaran ke dua dapat di lihat dari Indikator Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dengan realisasi pada tahun 2016 mencapai 56% atau tingkat capaiannya sebesar 101,82% dari target 55 % yang ditetapkan. Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran ke dua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% dari target 2016 sebesar 51,72%. Capaian dari indikator ini sebesar 106.67%

- c. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya di dukung

dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Pada Tahun anggaran 2016 ini pencapaian indikator kinerja daerah di dilaksanakan oleh 14 program dan 77 kegiatan.

- d. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap empat indikator kinerja yang di laksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016, rata – rata capaian indikator sasaran strategis yang di capai yaitu sebesar 125.2%
- e. Dari evaluasi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan yang di laksanakan Bappeda pada tahun 2016 capaian output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2016 hampir seluruhnya sebesar 100%, hanya terdapat satu kegiatan dengan capaian realisasi fisik sebesar 75% sehingga capaian realisasi fisik kegiatan tahun 2016 yaitu sebesar 99.68% .
- f. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.900.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.128.573.069,- atau sebesar 91.32%. Realisasi tahun 2016 sedikit lebih di dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar 86.62%. Realisasi capaian pada tahun 2016 terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar 92.25% dan realisasi belanja langsung 90.99% (realisasi belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 84.95%).

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang serta langkah ke depan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif, sehingga menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan;
- b. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (good governance), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
- c. Penyusunan dokumen - dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan yang di dukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian. Serta peningkatan pengelolaan

administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.

- d. Membuat database dan sistem informasi pembangunan daerah yang mencakup sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis teknologi informatika.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu;
- f. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- g. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan;
- h. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.

DOKUMEN KOTA MAGELANG